

KAJIAN PUBLIKASI DAN IMPLEMENTASI SERAH SIMPAN PUBLIKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

Assessment on Publication and Implementation of Deposit Collection within Ministry of Agriculture

**Penny Ismiati Iskak, Heryati Suryantini, Ety Andriaty, Eka Kusmayadi,
dan Riko Bintari Pertamasari**

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian
Jalan Ir. H. Juanda No. 20, Bogor 16122
Telp. (0251) 8321746; Faks. (0251) 8326561
E-mail: penny.iskak@gmail.com

Diajukan: 11 Februari 2020; Diterima: 14 Mei 2020

ABSTRAK

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) merupakan perpustakaan khusus di bawah Kementerian Pertanian yang berperan sebagai pusat ilmu pengetahuan pertanian nasional. Oleh karena itu, PUSTAKA terus memperkaya koleksi melalui pembelian, pertukaran, hadiah/hibah, dan serah simpan dari UK/UPT Kementerian Pertanian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 433/2003 tentang Pengiriman Publikasi, Dokumentasi dan Informasi Bidang Pertanian. Namun, penghimpunan koleksi melalui serah simpan belum optimal. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui penerbitan publikasi di UK/UPT Kementerian Pertanian, implementasi SK Menteri Pertanian Nomor 433/2003, dan kendala yang dihadapi. Populasi pengkajian adalah pengelola publikasi di UK/UPT Kementerian Pertanian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada 86 pengelola publikasi. Hasil pengkajian menunjukkan hampir semua UK/UPT (99%) menerbitkan publikasi yang berupa laporan tahunan (95%), leaflet (86%), petunjuk teknis (72%), buletin (52%), dan majalah ilmiah 25%. UK/UPT yang menerbitkan publikasi dalam media tercetak sebanyak 49%, media tercetak dan digital 48%, dan media digital 3%. Mayoritas responden (94%) menyatakan publikasi yang diterbitkan disebar ke pengguna. Sebanyak 87% UK/UPT mengirimkan publikasi ke perpustakaan internal dan lebih dari separuh responden (53%) menyatakan publikasi dapat diakses secara online. Implementasi serah simpan publikasi belum berjalan optimal karena baru 34% UK/UPT yang mengirimkan publikasi ke PUSTAKA. Kendala dalam implementasi serah simpan publikasi yaitu kurangnya pengetahuan pengelola publikasi tentang kewajiban mengirimkan terbitan ke PUSTAKA dan terbatasnya biaya pengiriman. Berdasarkan hasil kajian perlu dilakukan sosialisasi kepada UK/UPT mengenai kewajiban serah simpan publikasi dan penyempurnaan/revisi surat keputusan Menteri Pertanian No. 433/2003 sesuai dengan perubahan peraturan yang ada.

Kata kunci: *Publikasi pertanian; Koleksi deposit; Wajib serah simpan; Kementerian Pertanian*

ABSTRACT

The Indonesian Center for Agricultural Library and Technology Dissemination (ICALTD) is a special library under the Ministry of Agriculture (MoA) that acts as the national agricultural science center. This requires ICALTD to enrich the collections through purchase, exchange, gifts/grants, and compiling publications of MoA's institutions based on the Decree of the Minister of Agriculture No. 433/2003 concerning Delivery of Agricultural Publications, Documentation and Information. However, the collection of publications within MoA is not yet optimal. A descriptive study was conducted to find out publishing publications of MoA's institutions, implementation of the Decree of the Minister of Agriculture No. 433/2003; and constraints in implementing the decree. Data were collected through interviews to 86 MoA's publication managers. The results showed that almost all of the institutions (99%) published publications, including annual reports (95%), leaflets (86%), technical guidelines (72%), bulletins (52%), and journals (25%). As much as 49% institutions published publications in print media, 48% in print and digital media, and only 3% in digital media. Most of respondents (94%) stated that the publications were distributed to users, especially to the internal library (87%), and 53% respondents stated that the publications could be accessed online. Implementation of the obligation to deliver publication was not running optimally because only 34% of institutions that send publications to ICALTD. Constraints in the implementation of delivery of publications are less awareness of the publication manager to send publications to ICALTD and limitations on shipping costs. Based on the results of this study, it is necessary to socialize the obligation to deliver publications periodically to ICALTD and revision of the Minister of Agriculture Decree No. 433/2003 in accordance with changes in existing regulations.

Keywords: *Agricultural publications; Deposit collection; Deposit obligation; Ministry of Agriculture*

PENDAHULUAN

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) merupakan salah satu unit kerja Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan perpustakaan dan penyebarluasan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2015. Sebagai perpustakaan khusus di Kementerian Pertanian, PUSTAKA berupaya memajukan dan menyebarluaskan pengetahuan bidang pertanian melalui penyediaan informasi bagi pemustaka, baik petani, penyuluh, peneliti, pengambil kebijakan maupun masyarakat umum. Petani memerlukan informasi untuk pengambilan keputusan dalam mengelola usaha taninya, baik informasi teknologi pertanian, rantai pasok, pasar, maupun harga. Penyuluh membutuhkan informasi untuk menyusun bahan penyuluhan. Peneliti memerlukan informasi hasil penelitian terbaru untuk mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan sebagai rujukan dalam melaksanakan penelitian. Sementara pengambil kebijakan membutuhkan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembangunan pertanian.

Menurut standar nasional perpustakaan, penyelenggaraan perpustakaan khusus bertujuan untuk: (1) menunjang program lembaga induk, (2) menunjang penelitian lembaga induk, (3) menggalakkan minat baca di lingkungan unit kerja lembaga induk, dan (4) memenuhi kebutuhan pemustaka di lingkungan perpustakaan (Perpustakaan Nasional RI 2017). Adapun fungsi perpustakaan khusus yaitu: (1) mengembangkan koleksi yang menunjang kinerja lembaga induknya; (2) menyimpan semua terbitan dari dan tentang lembaga induknya; (3) menjadi *focal point* untuk informasi terbitan lembaga induknya; dan (4) menyediakan akses informasi pada tingkat lokal, nasional, regional, dan global.

PUSTAKA sebagai perpustakaan khusus di Kementerian Pertanian berperan sebagai pusat ilmu pengetahuan pertanian di tingkat nasional, selain berperan dalam penyebaran informasi teknologi pertanian. Kedua peran tersebut memacu pengelola perpustakaan untuk terus memperkuat dan memperkaya koleksi, baik dari dalam maupun luar Kementerian Pertanian, serta dari luar negeri agar *current status of knowledge* bidang pertanian di Indonesia tidak usang. Sampai tahun 2018, koleksi PUSTAKA mencapai 61.238 judul yang terdiri atas koleksi tercetak (buku teks, tesis, disertasi, buku petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, pedoman umum,

booklet, folder, dan peta) serta koleksi elektronis, baik *off line* maupun *on line* (Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian 2018).

Koleksi perpustakaan PUSTAKA berasal dari pembelian, pertukaran, hadiah/hibah, serta dari serah simpan publikasi yang diterbitkan unit kerja/unit pelaksana teknis (UK/UPT) lingkup Kementerian Pertanian. Koleksi serah simpan UK/UPT disebut koleksi deposit. Koleksi deposit ialah koleksi yang disimpan dan dikumpulkan di suatu tempat untuk tujuan keamanan, terhindar dari kerusakan dan kehilangan agar lestari sepanjang masa. Di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1990, koleksi deposit merupakan kumpulan karya cetak dan karya rekam yang diserahkan oleh penerbit dan pengusaha rekam kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Sejalan dengan undang-undang tersebut, Kementerian Pertanian menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 433/kpts/HM.160/9/2003 tentang Pengiriman Publikasi, Dokumentasi dan Informasi Bidang Pertanian. Berdasarkan surat keputusan tersebut, setiap UK/UPT Kementerian Pertanian wajib menyerahkan karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan ke PUSTAKA. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan publikasi dan melestarikan kekayaan budaya bangsa. Penghimpunan publikasi dilakukan dengan cara mendatangi langsung UK/UPT, mengirimkan publikasi melalui pos atau mengantarnya langsung ke PUSTAKA. Namun, upaya tersebut belum optimal dan koleksi yang diperoleh makin menurun. Kondisi tersebut kemungkinan disebabkan (1) ketidaktahuan pimpinan UK/UPT tentang Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 433/kpts/HM.160/9/2003, dan (2) pengelolaan kegiatan serah simpan di PUSTAKA belum optimal.

Terbitan UK/UPT Kementerian Pertanian merupakan koleksi berharga dan bermanfaat karena kandungan lokalnya (*local content*) serta tidak diperjualbelikan sehingga keberadaannya sangat terbatas. UK/UPT Kementerian Pertanian tersebar di seluruh provinsi sehingga publikasinya mengandung informasi spesifik lokasi sesuai dengan lokasi UK/UPT. Hasil pengkajian Iskak *et al.* (2019) menunjukkan bahwa mayoritas pemustaka yang berkunjung ke PUSTAKA memanfaatkan koleksi hasil serah simpan untuk mendukung kegiatan mereka. Penurunan koleksi hasil serah simpan akan mengurangi kandungan informasi lokal dan menurunkan pemanfaatan publikasi yang diterbitkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pengkajian ini dilakukan untuk mengetahui (1) penerbitan publikasi di UK/UPT Kementerian Pertanian; (2) implementasi Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 433/kpts/HM.160/9/2003 tentang Pengiriman Publikasi, Dokumentasi dan Informasi Bidang Pertanian; (3) kendala yang dihadapi UK/UPT dalam mengirimkan publikasi ke PUSTAKA; dan (4) pengelolaan kegiatan serah simpan publikasi, dokumentasi, dan informasi bidang pertanian di PUSTAKA. Hasil pengkajian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam (1) pengembangan koleksi perpustakaan melalui serah simpan dan (2) penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 433/kpts/HM.160/9/2003 agar dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Selain aspek praktis, hasil pengkajian juga memberikan kontribusi bagi pengembangan teori perpustakaan dan informasi.

METODE

Pengkajian kuantitatif deskriptif dilaksanakan di PUSTAKA dan UK/UPT Kementerian Pertanian yang menerbitkan dan menyebarkan publikasi kepada pengguna. Pengkajian dilaksanakan mulai bulan Maret sampai Desember 2018.

Populasi pengkajian ini ialah pengelola publikasi di UK/UPT Kementerian Pertanian. Secara keseluruhan terdapat 62 UK dan 158 UPT sehingga populasi pengkajian berjumlah 220 pengelola publikasi. Berdasarkan metode Slovin (Sevilla *et al.* 2007 dalam Supriyanto dan Iswandari 2017) diperoleh sampel sebanyak 69 pengelola publikasi di UK/UPT. Sampel diambil secara acak (*random sampling*). Secara keseluruhan terdapat 82 UK/UPT yang bersedia mengisi kuesioner.

Data dikumpulkan melalui pengiriman kuesioner dan wawancara langsung dengan responden. Kuesioner disusun untuk menggali informasi mengenai (1) publikasi yang diterbitkan UK/UPT Kementerian Pertanian (jenis, frekuensi terbit, penggunaan ISBN/ISSN, dan format publikasi); (2) penyebaran publikasi, ketersediaan publikasi di perpustakaan, dan pengiriman publikasi ke PUSTAKA; dan (3) implementasi Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 433/kpts/HM.160/9/2003, mencakup pengetahuan responden tentang surat keputusan tersebut, ketersediaan anggaran dan pelaksanaannya. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan SPSS version 22.0 dan dianalisis secara deskriptif. Selain data primer juga dilakukan studi

kepustakaan untuk mengetahui teori dan hasil penelitian tentang pengembangan koleksi. Dilakukan pula *Focus Group Discussion* untuk menggali masukan dalam perbaikan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 433/kpts/HM.160/9/2003.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografi

Responden pada pengkajian ini terdiri atas pengelola publikasi di unit kerja eselon 2 (57,8%) dan unit pelaksana teknis (42,2%). Mayoritas responden (80,49%) berada di Jawa, sisanya di Sumatera dan Sulawesi (masing-masing 7,32%), Kalimantan (3,66%), dan Nusa Tenggara Timur (1,22%) (Tabel 1). Kegiatan penerbitan pada umumnya dilaksanakan oleh subbidang yang terkait dengan penyebaran informasi. Namun di PUSTAKA, penerbitan publikasi dilaksanakan oleh subbidang yang mempunyai tugas khusus dalam menerbitkan publikasi.

Penerbitan Publikasi di Lingkup Kementerian Pertanian

Hampir semua UK/UPT (99%) yang menjadi responden dalam pengkajian ini melaksanakan kegiatan penerbitan publikasi. Pengelola publikasi menyatakan bahwa tujuan menerbitkan publikasi ialah untuk menyebarkan informasi teknologi dan informasi lain mengenai hasil kegiatan dan capaian organisasi, pedoman/panduan/petunjuk teknis, dan peraturan-peraturan di bidang pertanian. Selain berfungsi untuk menyebarkan informasi, publikasi juga menjadi media bagi pemangku jabatan fungsional untuk menerbitkan karya tulis ilmiah, sebagai salah satu syarat untuk naik ke jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi (Suryantini dan Setyorini 2015) serta

Tabel 1. Sebaran responden berdasarkan karakteristik demografi.

Karakteristik	Persentase
Tingkat organisasi	
Eselon 2	57,80
Eselon 3	42,20
Wilayah kedudukan	
Jawa	80,49
Sumatera	7,32
Sulawesi	7,32
Kalimantan	3,66
Nusa Tenggara Timur	1,22

sebagai media komunikasi untuk menyampaikan inovasi, teknologi, ide, gagasan, metode uji, dan lainnya.

Jumlah dan Jenis Publikasi yang Diterbitkan

Jenis publikasi yang diterbitkan meliputi majalah ilmiah, warta, buletin, buku/monograf, pedoman, petunjuk teknis, laporan tahunan, laporan hasil penelitian, laporan akhir tahun kegiatan, buku saku, *leaflet*, dan brosur (Tabel 2). Sebanyak 52% UK/UPT menerbitkan jenis-jenis publikasi tersebut. Hampir semua UK/UPT (95%) menerbitkan laporan tahunan, 86% menerbitkan *leaflet* dan 72% menerbitkan petunjuk teknis. Laporan tahunan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban lembaga pemerintah atas dana yang digunakan, selain untuk menyebarluaskan kemajuan dan keberhasilan yang dicapai lembaga selama satu tahun. Dengan laporan tahunan, masyarakat dapat mengawasi kinerja lembaga pemerintah (Lou, Li & Chen 2018). Sementara *leaflet* merupakan media promosi untuk memperkenalkan produk atau layanan kepada masyarakat luas sehingga media ini banyak digunakan untuk promosi dan mendekatkan lembaga pemerintah dengan masyarakat.

Jumlah publikasi yang diterbitkan UK/UPT bervariasi (Tabel 3), paling banyak 8-10 publikasi (33% UK/UPT) dan diikuti 6-7 publikasi (30% UK/UPT) (Tabel 3). Banyaknya jenis publikasi yang diterbitkan menunjukkan UK/UPT menerapkan strategi diseminasi *multichannel* dalam menyebarkan informasi. UK/UPT penerbit majalah ilmiah sebesar 25%. Majalah ilmiah diterbitkan oleh lembaga riset dan berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia No. 04/E/2012 tahun 2012.

Tabel 2. Sebaran responden berdasarkan jenis publikasi yang diterbitkan.

Jenis publikasi	Persentase
Laporan tahunan	95
<i>Leaflet</i>	86
Petunjuk teknis	72
Brosur	71
Laporan akhir tahun kegiatan	64
Buletin	52
Pedoman	45
Buku saku	45
Laporan hasil penelitian	36
Buku teks/monograf	35
Majalah ilmiah	25

Tabel 3. Sebaran responden berdasarkan jumlah publikasi yang diterbitkan.

Jumlah publikasi yang diterbitkan	Persentase
1–3	14
4–5	23
6–7	30
8–10	33

Kontinuitas Penerbitan Publikasi

Mayoritas pengelola publikasi di UK/UPT (75%) menyatakan bahwa mereka menerbitkan publikasi secara rutin. Namun ada 8% yang menyatakan tidak menerbitkannya secara rutin karena keterbatasan anggaran percetakan. Ada pula UK/UPT yang menerbitkan publikasi secara rutin dan tidak rutin (17%). Publikasi yang diterbitkan secara rutin ialah majalah ilmiah, majalah, laporan tahunan, laporan penelitian, dan laporan akhir tahun kegiatan, sedangkan buku teks/monograf, buklet, *leaflet*, brosur, pedoman, dan petunjuk teknis diterbitkan secara tidak rutin (Tabel 4).

Keberadaan ISSN dan ISBN

Sebanyak 14,45% UK/UPT menerbitkan publikasi dengan ISSN/ISBN dan 22,89% UK/UPT tidak menggunakan ISSN/ISBN dalam publikasinya (Tabel 5). Pada umumnya terbitan berseri berupa majalah ilmiah (buletin/jurnal) diterbitkan dengan menggunakan ISSN (30,12%).

Tabel 4. Kesenambungan penerbitan publikasi.

Kesenambungan terbitan	Persentase
Rutin	75
Rutin (berkala) dan tidak rutin (publikasi lainnya)	17
Tidak rutin	8

Tabel 5. Sebaran responden berdasarkan keberadaan ISSN dan ISBN pada publikasi.

Keberadaan ISSN/ISBN	Persentase
Ada ISSN/ISBN	14,45
Tidak ada ISSN/ISBN	22,89
Ada ISSN untuk publikasi berseri dan ISBN untuk yang tidak berseri	30,12
Hanya buku yang dilengkapi ISBN	32,53

Sebanyak 27 UK/UPT (32,53%) menerbitkan buklet, buku/monograf, dan buku pedoman yang dilengkapi ISBN. Sebagian publikasi tidak dilengkapi ISBN/ISSN karena publikasi tersebut disebar untuk kalangan terbatas, misalnya peserta pelatihan, atau publikasi tersebut berbentuk *leaflet* dan brosur yang tidak disyaratkan untuk menggunakan ISSN/ISBN. ISSN merupakan salah satu syarat dalam akreditasi majalah ilmiah (Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 2018). Sedangkan ISBN merupakan kode identifikasi suatu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit.

Frekuensi Terbit Publikasi Berseri

Hampir separuh UK/UPT (47%) menerbitkan publikasi berseri dengan frekuensi satu kali setahun (Tabel 6). Publikasi berseri tersebut di antaranya ialah laporan tahunan dan laporan akhir tahun kegiatan. Hanya 6% UK/UPT yang menerbitkan publikasi berseri lebih dari 4 kali setahun. Majalah ilmiah pada umumnya diterbitkan 2 kali dalam setahun. Hasil penelitian yang diterbitkan dalam majalah ilmiah merupakan indikator kinerja penelitian. Penerbitan tersebut dimaksudkan agar hasil penelitian diketahui dan dimanfaatkan pengguna.

Media untuk Penerbitan Publikasi

Publikasi diterbitkan UK/UPT dalam format tercetak, digital, atau keduanya (Tabel 7) Sebanyak 49% UK/UPT menerbitkan publikasi dalam format tercetak dan 48% dalam format tercetak dan digital. Hanya 3% UK/UPT yang menerbitkan publikasi dalam format digital karena biaya cetak terbatas.

Tabel 6. Sebaran responden berdasarkan frekuensi terbit publikasi.

Frekuensi terbit per tahun	Persentase
1	47
2	28
3	9
4	10
>4	6

Tabel 7. Sebaran responden berdasarkan format terbitan.

Format terbitan	Persentase
Tercetak	49
Tercetak dan Digital	48
Digital	3

Dengan semakin meningkatnya trend penggunaan gadget, seperti smartphone untuk akses internet, informasi pun semakin mudah diakses. Kondisi ini memotivasi UK/UPT menerbitkan publikasi secara *online* agar dapat diakses oleh lebih banyak pengguna. Biaya penerbitan pun semakin murah.

Penyebaran Publikasi

Mayoritas responden (94%) menyatakan publikasi yang diterbitkan disebar ke pengguna. Jangkauan penyebaran dipengaruhi oleh tiras dan format terbitan. Publikasi dalam format digital dapat diakses melalui situs *web* sehingga jangkauan penyebarannya meliputi seluruh penjuru dunia. Sebaliknya, publikasi tercetak dengan tiras kecil hanya dapat menjangkau pengguna terbatas. Hanya 2% UK/UPT yang menyatakan publikasi tidak disebar atau hanya untuk kalangan internal karena berupa laporan hasil kegiatan pelatihan, sementara 6% menyatakan kadang-kadang menyebarkan publikasi yang diterbitkan.

Setiap jenis publikasi mempunyai target audiens yang berbeda. Pada umumnya laporan tahunan diterbitkan dalam bentuk tercetak dan digital. Bentuk tercetak diperbanyak secara terbatas, sedangkan bentuk digital diunggah ke situs *web* UK/UPT. Demikian pula majalah ilmiah yang dikelola melalui *Open Journal System* (OJS), semua artikel yang dimuat di majalah tersebut dapat diakses secara *online*. Buku teks, monograf, prosiding, buku saku, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan agribisnis dan pengolahan hasil pertanian pada umumnya berbentuk digital. Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan lingkup eselon 1 disebar ke UK/UPT lingkup eselon 1 tersebut. Sementara petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan UK/UPT disebar ke masing-masing eselon 1. Publikasi yang bersifat promosi produk biasanya dibagikan pada saat pameran atau kegiatan promosi lainnya.

Pengiriman Publikasi ke Perpustakaan

Mayoritas responden (87%) menyatakan publikasi yang diterbitkan dikirim ke perpustakaan internal sebagai koleksi perpustakaan sekaligus konten lokal yang sangat berharga. Sepuluh persen responden tidak menyerahkan publikasi ke perpustakaan internal karena tidak memiliki perpustakaan, dan sisanya kadang-kadang menyerahkan publikasi ke perpustakaan. Penyimpanan publikasi di perpustakaan internal UK/UPT menjadi wahana pelestarian informasi.

Ketersediaan Publikasi di Perpustakaan

Lebih dari separuh responden (69%) menyatakan perpustakaan memiliki semua publikasi yang diterbitkan instansinya (koleksi lokal), padahal 87% menyatakan menyerahkan publikasi ke perpustakaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara publikasi yang diserahkan ke perpustakaan dan koleksi yang tersedia. Menurut responden, hal ini karena publikasi seperti *leaflet*, brosur, buku saku, dan publikasi lain untuk keperluan pelatihan tidak diserahkan ke perpustakaan. Ada pula responden yang menyatakan beberapa publikasi hilang sehingga koleksi berkurang. Responden yang menyatakan perpustakaannya hanya memiliki sebagian publikasi yang diterbitkan sebanyak 23% dan 8% menyatakan tidak tersedia.

Akses Publikasi Secara Online

Lebih dari separuh responden (53%) menyatakan publikasi yang diterbitkan dapat diakses secara *online*, dengan rincian 2% UK/UPT menerbitkan publikasi secara tercetak lalu melakukan digitasi, 48% menerbitkan publikasi dalam format tercetak dan digital, dan 3% menerbitkan hanya dalam format digital. Sebanyak 27% responden menyatakan sebagian publikasi dapat diakses *online* dan 20% menyatakan tidak dapat diakses *online*. Publikasi yang dapat diakses secara *online* ialah majalah ilmiah, laporan tahunan, buletin, pedoman umum, pedoman teknis, dan buku. Sementara buku panduan untuk keperluan pelatihan, bimbingan teknis atau pertemuan serupa tidak dapat diakses secara *online*. Demikian pula dengan *leaflet* dan brosur.

Penerbitan secara *online* memperluas jangkauan diseminasi informasi sehingga dapat diakses oleh pengguna sebanyak mungkin. Oleh karena itu dalam akreditasi majalah ilmiah dicantumkan 3 kriteria diseminasi secara *online* (Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 2018).

Implementasi Kewajiban Pengiriman Publikasi Ke PUSTAKA

Unit kerja dan unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian menghasilkan berbagai publikasi yang memuat informasi pertanian spesifik lokasi sesuai dengan mandat institusinya sehingga kaya kandungan lokal pengetahuan pertanian. Menyadari pentingnya

melestarikan kandungan lokal sebagai warisan budaya bangsa, PUSTAKA mengumpulkan karya cetak dan karya rekam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 433/kpts/HM.160/9/2003 tentang Pengiriman Publikasi, Dokumentasi dan Informasi Bidang Pertanian. Berdasarkan surat keputusan tersebut, UK/UPT Kementerian Pertanian wajib mengirimkan dua eksemplar publikasi yang diterbitkan ke PUSTAKA.

Pengiriman Publikasi ke PUSTAKA

Lebih dari separuh (57%) UK/UPT tidak mengirimkan publikasi ke PUSTAKA, 34% mengirimkan, 8% kadang-kadang mengirimkan, dan 1% jarang mengirimkan. Sebagian UK/UPT tidak mengirimkan publikasi ke PUSTAKA karena tidak mengetahui adanya kewajiban pengiriman publikasi tersebut. Ketika responden ditanya tentang SK Menteri Pertanian No. 433/2003 tentang Pengiriman Publikasi, Dokumentasi, dan Informasi bidang pertanian, sebagian besar (65%) menyatakan tidak mengetahui adanya kewajiban serah simpan. Namun ada juga pengelola publikasi yang tidak mengetahui SK tersebut, tetapi tetap mengirim publikasi yang diterbitkan ke PUSTAKA. Ada pula yang mengetahui surat keputusan tersebut, tetapi tidak mengirimkan publikasi ke PUSTAKA karena kendala biaya pengiriman. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa kewajiban serah simpan publikasi oleh UK/UPT Kementerian Pertanian ke PUSTAKA belum sepenuhnya dilaksanakan.

Selama 15 tahun sejak dikeluarkannya SK Menteri Pertanian Nomor 433/2003, banyak perubahan yang terjadi, di antaranya jenis publikasi yang diterbitkan, format publikasi, dan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini mendorong perlunya melakukan revisi terhadap SK Mentan tersebut. Sebanyak 41% pengelola publikasi menyarankan perbaikan dengan memperjelas: (1) mekanisme penyerahan publikasi; (2) jenis-jenis publikasi yang wajib diserahkan, termasuk memiliki ISSN/ISBN; (3) hak dan kewajiban pengirim publikasi; dan (4) batasan tahun pengiriman, misalnya maksimal 6 bulan setelah cetak. Perlu pula membentuk tim yang bertanggung jawab dalam penyerahan publikasi di setiap eselon 1. Di sisi lain PUSTAKA berkewajiban mengingatkan UK/UPT untuk mengirimkan publikasinya. Saran-saran tersebut merupakan bahan masukan dalam menyiapkan revisi Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 433/2003.

Metode Pengiriman Publikasi ke PUSTAKA

Cara pengiriman publikasi yang dipilih responden yaitu melalui pos/ekspedisi, diantar langsung oleh petugas, dijemput petugas dari PUSTAKA, dikirimkan oleh perwakilan dari eselon I, mengunduh dari repositori Kementerian Pertanian atau situs UK/UPT, dan dikirim melalui email (Tabel 8). Cara yang paling banyak dipilih responden (38,55%) yaitu mengirim publikasi melalui pos/ekspedisi. Namun ada 7,24% responden yang mengusulkan agar di setiap eselon I ditunjuk satu orang pustakawan/pengelola publikasi untuk mengoordinir pengiriman publikasi yang diterbitkan oleh UK/UPT di lingkungan eselon I tersebut.

Cara pengiriman dengan menunjuk pustakawan/pengelola publikasi sebagai koordinator dinilai efektif jika lokasi UK/UPT di setiap eselon berdekatan sehingga tidak memerlukan biaya tambahan untuk pengumpulan secara berjenjang. Realitanya, lokasi UK/UPT eselon I tersebar di berbagai wilayah. Oleh karena itu, PUSTAKA dapat menerapkan berbagai cara dalam pengumpulan publikasi.

Metode Pelaksanaan Kewajiban Serah Simpan ke Perpustakaan Nasional

Dalam FGD yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Kementerian Luar Negeri pada bulan Maret 2018, narasumber dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), Sri Marganingsih, SH, MAP menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang No.4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, Perpusnas RI akan berkoordinasi dengan perpustakaan utama di Lembaga Kementerian dan Lembaga Non Kementerian (LK/LNK). Untuk itu, akan diatur penggunaan akun tunggal untuk setiap LK/LNK dalam pengurusan ISBN. Berkaitan dengan hal itu, responden dimintai pendapat mengenai penunjukan

PUSTAKA mengelola akun tunggal untuk pengurusan ISBN lingkup Kementerian Pertanian. Mayoritas responden (86,75%) menyatakan setuju terhadap pengelolaan akun tunggal. Hanya 7,22% yang menyatakan tidak setuju karena telah mampu mengurus ISBN dan 6,03% menyatakan tidak tahu.

Banyaknya dukungan terhadap PUSTAKA sebagai akun tunggal dalam pengurusan ISBN mengindikasikan banyak responden yang memerlukan bantuan dalam pengurusan ISBN. Di sisi lain, akun tunggal akan memudahkan Perpusnas dalam memonitor penghimpunan bahan perpustakaan untuk koleksi deposit. Dengan pemberian akun tunggal kepada PUSTAKA, berarti PUSTAKA berkewajiban (1) mengumpulkan publikasi UK/UPT di Kementerian Pertanian minimal 4 eksemplar (2 eksemplar untuk dikirim ke Perpusnas dan 2 eksemplar untuk dikelola di PUSTAKA sebagai deposit); (2) mengelola permohonan ISBN untuk terbitan UK/UPT Kementerian Pertanian; dan (3) mengelola publikasi hasil serah simpan.

Keterlambatan pengiriman karya cetak karya rekam (KCKR) dari UK/UPT Kementerian Pertanian ke Perpusnas dapat menghambat pengurusan ISBN yang pada akhirnya akan menghambat kegiatan penerbitan publikasi. Di lain pihak, PUSTAKA menghadapi kendala keterbatasan SDM sehingga diperkirakan ketiga kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Untuk itu, disarankan perlunya pembentukan Tim Pengelola Serah Simpan KCKR yang terdiri atas komponen multibidang, yaitu: (1) Bidang Penyebaran Teknologi Pertanian untuk mengurus akun ISBN, (2) Bidang Perpustakaan untuk kegiatan pengumpulan KCKR dari UK/UPT Kementerian Pertanian dan mengelola KCKR PUSTAKA, dan (3) Bagian Umum untuk pengiriman 2 eksemplar KCKR dari UK/UPT ke Perpusnas RI.

Acuan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Serah Simpan KCKR diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dan menjaga konsistensi kinerja pengelolaan KCKR. Acuan tersebut memuat rincian kerja secara kronologis dan satuan waktu yang diperlukan agar kegagalan dapat dihindari dan hambatan dapat diatasi. Oleh karena itu, disusun standar prosedur operasional kegiatan Pengelolaan Serah Simpan KCKR. Penyusunan standar tersebut berkoordinasi dengan Subbagian Kepegawaian PUSTAKA. Pada setiap pengumpulan dan penyerahan KCKR harus disertai dengan tanda terima KCKR.

Tabel 8. Cara penyerahan publikasi ke PUSTAKA.

Cara penyerahan	Fekkuensi	Persentase
Kirim via pos	32	38.55
Diserahkan	17	20.48
Dijemput	11	13.25
Dikirimkan oleh perwakilan eselon I	6	7.24
Melalui email	5	6.03
Dikirim secara <i>on line</i>	1	1.20
Semua cara	11	13.25

Landasan hukum bagi PUSTAKA sebagai pengelola KCKR sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan koleksi deposit dan memperkuat posisi PUSTAKA sebagai pusat ilmu pengetahuan pertanian pada masa yang akan datang. Diharapkan peran tersebut dapat dicantumkan dalam revisi Undang-Undang KCKR atau dalam Peraturan Pemerintah sebagai produk hukum di bawah Undang-Undang. Kedua produk hukum tersebut menjadi acuan PUSTAKA untuk melakukan revisi Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 433/kpts/HM.160/9/2003.

Pengelolaan Koleksi Publikasi Serah Simpan di PUSTAKA

PUSTAKA menerima publikasi dari UK/UPT Kementerian Pertanian yang diantar langsung oleh petugas, dikirim melalui pos, atau mendatangi masing-masing UK/UPT. Ketiga cara tersebut juga dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI (Bashar dan Rachman 2014).

Hasil wawancara dengan pengelola perpustakaan sebagai informan menunjukkan bahwa di PUSTAKA, bahan perpustakaan yang diterima diregistrasi secara manual dan elektronik. Proses registrasi dilakukan oleh staf di subbidang Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan dengan tahapan:

1. Pengelompokan bahan perpustakaan menurut jenis koleksi (buku, monograf berseri, CD, VCD, dan lainnya);
2. Pencatatan tanggal penerimaan, jenis koleksi, jumlah judul, jumlah eksemplar, nama dan alamat pengirim;
3. Pembubuhan identitas di halaman pertama, yaitu stempel tanggal terima dan stempel deposit pada halaman judul, 10 halaman pertama, dan halaman terakhir.

Bahan pustaka berbentuk majalah dikirim ke Subbidang Pelayanan Perpustakaan untuk didisplai selama 1-2 minggu. Setelah selesai masa displai, majalah diolah per artikel kemudian data hasil pengolahan ditambahkan ke pangkalan data iptektan. Sementara bahan pustaka selain majalah tidak didisplai, tetapi langsung diolah. Pustakawan mengolah bahan perpustakaan dengan tahapan sebagai berikut: (1) pencatatan nomor induk, (2) pembuatan katalog, (3) penentuan klasifikasi dan tajuk subjek, dan (4) pemasukan data ke dalam format digital.

Berbeda dengan di Perpustakaan RI, pengolahan koleksi deposit di PUSTAKA mengikuti prosedur bahan

perpustakaan pada umumnya, tanpa membubuhkan kode deposit. Penentuan klasifikasi berpedoman pada UDC. Dengan demikian, penjajaran di rak tidak berpedoman pada kode deposit, tetapi berdasarkan pada subjek. Lokasi penyimpanan koleksi hasil serah simpan sama dengan koleksi hasil pembelian dan pertukaran karena pada dasarnya publikasi tersebut secara aktif dilayankan kepada pengguna. Penjajaran dilakukan oleh pustakawan di pelayanan

PUSTAKA belum mengevaluasi UK/UPT yang mengirimkan publikasi untuk deposit sehingga kepatuhan wajib serah simpan belum dapat diketahui. Sesuai SK Menteri Pertanian Nomor 433/kpts/HM.160/9/2003, PUSTAKA tidak memberikan sanksi bagi UK/UPT yang tidak mengirimkan publikasi. Di samping itu, implementasi kebijakan serah simpan belum memerhatikan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hampir semua UK/UPT Kementerian Pertanian menerbitkan publikasi. Publikasi yang paling banyak diterbitkan yaitu laporan tahunan, diikuti *leaflet*, petunjuk teknis, brosur, laporan akhir kegiatan, buletin, pedoman, buku saku, buku teks, dan yang paling sedikit majalah ilmiah. Penggunaan ISBN/ISSN mengikuti persyaratan masing-masing publikasi. Publikasi berseri seperti majalah ilmiah umumnya diterbitkan dengan frekuensi 1-2 kali setahun, namun ada yang hingga empat kali setahun. Sebagian UK/UPT menerbitkan publikasi diterbitkan dalam media tercetak, media tercetak dan digital, atau hanya dalam media digital. Baru 50% UK/UPT yang publikasinya dapat diakses secara *online*.

Hampir semua UK/UPT menyebarkan publikasi yang diterbitkan ke pengguna sasaran. Namun kurang dari separuh yang mengirimkan publikasi ke PUSTAKA sebagai implementasi SK Menteri Pertanian No. 433 Tahun 2003 tentang Pengiriman Publikasi, Dokumentasi dan Informasi Bidang Pertanian. Hal ini karena UK/UPT belum mengetahui adanya kewajiban pengiriman publikasi ke PUSTAKA.

Saran

Sejalan dengan perkembangan format terbitan yang mengarah kepada format digital, disarankan untuk merevisi SK Mentan No. 433/2003 dengan (1) penambahan klausul tentang mekanisme wajib serah simpan publikasi, (2) jenis-jenis publikasi yang wajib diserahkan dan memiliki ISBN/ISSN, (3) batasan tahun pengiriman, misalnya maksimal 6 bulan setelah cetak, dan (4) hak dan kewajiban pengirim publikasi. Untuk mengoptimalkan implementasi wajib serah simpan, setiap tiga bulan sekali PUSTAKA hendaknya pada UK/UPT Kementerian Pertanian untuk mengingatkan wajib serah publikasi dan PUSTAKA.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standardisasi Nasional (2009). Standar Nasional Indonesia SNI 7496-2009: Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah. Jakarta: BSN
- Bashar, E.F. & Rahman, Yeni Budi Rahman. (2014). Strategi pengadaan koleksi deposit di Perpustakaan Nasional RI. Depok: Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-10//S55327-Emir%20Fadhil%20Bashar>. [diakses November 2018].
- Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. (2018). Pedoman akreditasi jurnal ilmiah. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 226 hlm. Di akses dari arjuna.ristek.go.id/about guideline
- Iskak, P.I., Suryantini, H. & Mugiarti, A. (2019). Perilaku pencarian informasi pemustaka di Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. *Jurnal Perpustakaan Pertanian*, 27(2): 59-66.
- Luo, Jin-Hui, Li, Xue & Chen, Huayang. (2018). Annual report readability and corporate agency. *China Journal of Accounting Research* 11: 187-212.
- Perpustakaan Nasional RI. (2017.) Standar Nasional Perpustakaan: Perpustakaan Khusus. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. (2018). Laporan Tahunan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. Bogor: PUSTAKA.
- Semertzaki, E. (2011). Special libraries. *In Chandos Information Professional Series, Special Libraries as Knowledge Management Centres*, Pages 1-56, Chandos Publishing. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781843346135500017>. [diakses 19 Oktober 2018].
- Supriyanto, W. & Iswandiri, R. (2017). Kecenderungan sivitas akademika dalam memilih sumber referensi untuk penyusunan karya tulis ilmiah di perguruan tinggi. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 13(1), 79-86. <https://jurnal.ugm.ac.id/bip/article/download/26074/16613>. [diakses 2 Februari 2018].
- Suryantini, H. & Setyorini, E. (2015). Hambatan Pustakawan dalam Penulisan Karya Ilmiah untuk *Jurnal Perpustakaan Pertanian*. *Jurnal Perpustakaan Pertanian* 24(2): 59-68.
- Undang-undang, peraturan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2015 tentang Penerbitan dan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Lingkungan Kementerian Kesehatan.